

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

Alif Aulia¹ Gun Gun Gumilar² Made Panji Teguh Santoso³ Evi Priyanti⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: 1910631180139@student.unsika.ac.id¹ gun.gumilar@staff.unsika.ac.id²
made.santoso@staff.unsika.ac.id³ evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Jika dilihat sebagai suatu proses transformasi, pembangunan pada dasarnya akan mengubah cara sumber ekonomi dialokasikan, manfaat didistribusikan, dan akumulasi. Hasilnya akan menjadi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Upaya untuk mengatasi masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam mensukseskan pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam menganalisis pemberdayaan yang baik. Indikator pemberdayaan yang baik menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay terdiri dari enam indikator yaitu wewenang, kompetensi, kepercayaan, kesempatan, tanggungjawab, dan dukungan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan dan harus diselesaikan. Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Kesejahteraan masyarakat Desa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, otonomi daerah memberikan otoritas kepada daerah untuk memutuskan untuk menjadi entitas otonom (Sedarmayanti, 2003). Otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah. Ini berarti desentralisasi memberikan otonomi yang luas kepada daerah melalui asas birokrasi Pemerintah daerah. Desentralisasi juga mencakup desentralisasi kepada masyarakat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat (Proborini Hastuti, 2018). Dalam kebijakan sentralistik, arahan dan perintah dari atas dibutuhkan, tetapi pemberdayaan menumbuhkan rasa kemandirian dan kreatif, yang memungkinkan untuk berkembang dengan kekuatan sendiri. Dengan otonomi daerah, diharapkan pola pendekatan yang bersifat bottom-up digunakan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Pemberdayaan ini juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam upaya mencapai hal tersebut, berbagai bisnis dari berbagai bidang terus dikembangkan. Namun, seringkali terjadi kegagalan dalam

pelaksanaannya, yang berarti tujuan tersebut tidak diimplementasikan, terutama pada masyarakat Desa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Desa dan masyarakat marginal adalah fokus utama dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan dari atas ke bawah (Dwi Iriani Margayaningsih, 2015). Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah karena fungsinya sebagai "pelayanan publik" untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketenteraman bagi masyarakat Daerah (Soares et al., 2015). Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah pada tingkat I, Pemerintah Daerah tingkat II, serta Pemerintah Desa (Fatkhul Muin, 2014). Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan atau dipisahkan dari Pemerintahan daerah yang lain, baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah Desa diberi kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan posisi Pemerintahan Desa sebagai berikut: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika" (Rahardjo Adisasmita, 2011).

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (S.Pakaya, 2016). Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan Desa telah menjadi fokus perhatian Pemerintah, namun strategi pembangunan Desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan Desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu (Faisal, 2019). Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan menangkali kemiskinan (Shuida, 2016).

Pembangunan Desa sangat penting karena merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah (Mendrofa & Rosidi, 2018). Hal ini ditunjukkan oleh berbagai program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah untuk meningkatkan kehidupan Desa. Hampir semua instansi, terutama Pemerintah daerah, memasukkan pembangunan Desa ke dalam program kerja mereka. Tentu saja berdasarkan pemahaman bahwa Desa adalah lokasi terdepan di mana sebagian besar orang tinggal. Desa berada di posisi terbawah dalam struktur Pemerintahan, tetapi berada di tengah-tengah masyarakat. Karena setiap program pembangunan Pemerintah akan selalu berdampak pada Desa. Masyarakat Desa dapat merencanakan atau menerima upaya untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan masyarakat Desa, yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Desa itu sendiri (Fatmawati et al., 2020). Pembangunan yang diatur oleh Pemerintah pusat dan diterapkan untuk setiap daerah dengan pola yang sama tentu akan menghadapi tantangan karena lingkungan masyarakat setiap daerah berbeda. Sebagai subjek dan objek pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut, menikmati hasilnya, dan terus menjaga proses itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembangunan harus datang dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan menikmati hasilnya.

Pembangunan masyarakat Desa adalah tantangan yang diakui. Ini disebabkan oleh kurangnya modal, tingkat pendidikan yang rendah, homogenitas masyarakat Desa yang menyebabkan daya saing yang rendah, dan kurangnya tenaga yang dapat membimbing mereka ke arah pembaharuan. Namun, semua masalah ini harus diakui dan dimungkinkan untuk mencari cara untuk menyelesaikannya untuk pembangunan Desa. Lebih lanjut, bahwa pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya Desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excellent*) (Alfiaturrahman, 2016). Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan Pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan Desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari Desa.

Dalam penelitian ini, guna menganalisis teori yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) sebagai alur berfikir dalam menganalisa mengenai Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang yakni:

1. *Authority* (wewenang), kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri;
2. *Competence* (kompetensi), kompetensi menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
3. *Trust* (kepercayaan), kepercayaan menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
4. *Oppurtunities* (kesempatan), memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
5. *Responsibilities* (tanggungjawab), tanggungjawab dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
6. *Support* (dukungan), perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak (Sugiyono, 2019). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana jalannya Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah pemberdayaan Masyarakat berjalan efektif atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam mendukung penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh melalui teknik pengumpulan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, antara data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang serta data sekunder diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen hukum, jurnal dan berita lainnya yang ada media *online* yang memiliki korelasi dengan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu tehnik wawancara, dengan tanya jawab mengenai masalah Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang. Serta, tehnik observasi ke Desa Warung Bambu untuk mengetahui Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang. Teknik analisis penelitian ini meliputi 3 (tiga) macam kegiatan selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell dan J. David Creswell (Creswell & Creswell, 2018) Pertama, reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada. Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan. Data-data yang sesuai tersebut berkaitan dengan masalah utama yang teridentifikasi; Kedua, *display* data atau penyajian data yaitu menyajikan berbagai informasi data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan; dan Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu penyimpulan ringan sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wewenang Masyarakat dalam Program Pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam Mensukseskan Pembangunan Desa

Pembangunan adalah masalah yang kompleks (Mardikanto, 2010). Dalam hal manajemen, kompleksitas itu berarti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi harus dilakukan. Bidang yang harus dibangun juga memiliki banyak aspek kehidupan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan adalah komponennya. Masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan dalam pemerintahan otoriter sentralistis. Masyarakat diposisikan sebagai subyek pembangunan daripada sebagai obyek pembangunan saat membangun pemerintahan demokratis.

Lebih lanjut, bahwa pemberdayaan adalah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di seluruh kehidupan (Karmila et al., 2021). Ada dua cara untuk melihat "pemberdayaan", atau masyarakat desa. Pertama dan terpenting, pemberdayaan didefinisikan sebagai posisi masyarakat. Masyarakat berada dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang bertindak secara mandiri daripada menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) yang bergantung pada pemberian dari pihak luar, seperti pemerintah. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Memungkinkan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak mencukupi atau tidak layak dapat menunjukkan tingkat kemiskinan. Pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi adalah

beberapa kebutuhan dasar. Selain itu, keterbelakangan seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses terbatas ke tanah, meskipun sektor pertanian masih sangat bergantung, dan melemahnya pasar lokal dan tradisional karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional (Sunyoto Usman, 2004). Dengan kata lain, masalah keterbelakangan mencakup aspek kultural dan struktural (kebijakan). Agar pemberdayaan berhasil dan berlangsung, partisipasi dan keterlibatan masyarakat diperlukan dalam prosesnya. Selain itu, agar pemberdayaan berhasil, kita juga perlu membangun manusianya supaya mereka dapat menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perubahan yang terjadi, memiliki rasa tanggung jawab, dan ikut memelihara hasil upaya atau hasil (Timur & Tripuro, 2022). Salah satu tujuan pemberdayaan dalam rangka pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggali potensi yang dimilikinya

Pemberdayaan masyarakat di Desa mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam pembangunan Desa seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat Desa. Karena masyarakat desanya, maka hendaknya mereka ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan. Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah Desa Warung Bambu sudah melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa dengan memberdayakan langsung tanpa pihak ketiga. Namun, pemberdayaan dalam hal pelatihan seperti pelatihan usaha dan pelatihan membuat produk lokal masih belum dilakukan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: "Ya, Kami sudah melakukan pemberdayaan dalam pembangunan Desa dengan langsung tanpa pihak ketiga. Tapi, kami menyadari kami belum dapat melakukan pelatihan usaha dan pelatihan membuat produk lokal."

Masyarakat Desa Warung Bambu juga jarang sekali mendapatkan pemberdayaan yang baik. Pemerintah melakukan pemberdayaan tidak konsisten, sehingga Masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya pemberdayaan yang dilakukan untuk pembangunan Desa menjadi lebih baik. Hal tersebut berdasarkan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: "Sebagai Masyarakat, Saya dan beberapa warga lainnya jarang sekali mendapat pemberdayaan Pemerintah, sehingga kami tidak memikirkannya lagi." Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah; itu adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dengan pemerintah memberikan arahan, bimbingan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Karena masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan berjalan lambat dan sulit untuk mencapai sarannya.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam Pembangunan Desa

Konsep merupakan aspek yang berfokus pada tahapan dan syarat. Aspek konsep merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan supaya berjalan dengan baik haruslah dibuat konsep terlebih dahulu supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan bersama (Hamid, 2018). Dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, istilah pemberdayaan semakin populer. Konsep pemberdayaan berasal dari kenyataan bahwa seseorang atau masyarakat tidak berdaya atau pihak yang lemah. Pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, koneksi, semangat, kerja keras, ketekunan, dan elemen lainnya yang tidak memiliki atau tidak memiliki. Ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan adalah hasil dari kelemahan dalam berbagai aspek tersebut.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya (Hikmat Harry, 2010). Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (dalam Adisasmita Rahardjo, 2011). Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Parson, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (dalam Hatu, 2010). Adapun, pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan.

Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan Masyarakat untuk pembangunan desa tidak memiliki persyaratan dan konsep dalam pelaksanaannya sehingga pemberdayaan yang dilakukan hanya pada siapa yang mau diberdayakan, sehingga pemberdayaan tidak merata kepada semua Masyarakat Desa. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: "Untuk persyaratan kami tidak ada, karena pemberdayaan yang dilakukan bagi siapa saja yang mau dan untuk yang tidak mau terserah mereka." Konsep pemberdayaan yang diberikan masih mengandung kekerabatan atau pihak yang dekat dengan Pemerintah saja. Akibat hal tersebut, Masyarakat yang sangat membutuhkan pemberdayaan menjadi tidak terlihat dan bahkan menghasilkan ketidakadilan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: "Pemerintah itu tidak adil konsepnya untuk melakukan pemberdayaan, Mereka hanya memberikan pemberdayaan bagi mereka yang kenal saja dan Masyarakat yang membutuhkan tidak diberdayakan."

Kepercayaan yang diberikan Masyarakat terhadap Pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Kepercayaan merupakan aspek yang berkaitan pada simpati dan empati yang diberikan, sehingga dapat mengikutinya. Kepercayaan pada pemberdayaan sangatlah penting dalam pelaksanaannya. Apabila tidak adanya kepercayaan tentunya pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah Desa mendapat kepercayaan yang cukup baik dalam Pemberdayaan Masyarakat terkait pembangunan Desa dari Masyarakat. Namun

Pemerintah belum bisa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan Masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Kami alhamdulillah, mendapat kepercayaan yang baik dari Masyarakat. Tapi kami menyadari bahwa kami masih kurang memanfaatkan kepercayaan itu dan itu kami harus segera perbaiki.” “Pemerintah itu dikasih kepercayaan yang baik oleh Masyarakat, namun masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik.”

Kesempatan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam Mensukseskan Pembangunan Desa

Kesempatan merupakan aspek yang berfokus pada pemberian wadah dalam kontribusi. Kesempatan dalam pemberdayaan sangatlah penting demi terciptanya kolaborasi antara Masyarakat dan Pemerintah untuk mensukseskan pemberdayaan yang mengacu pada pembangunan Desa. Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah Desa memberikan kesempatan Masyarakat dalam pemberdayaan terkait pembangunan Desa dengan lumayan baik namun sangat kurang, seperti pembuatan jalan yang lebih memilih Masyarakat Desa sendiri yang mengerjakan daripada membayar kontraktor dari luar. Hal tersebut dapat terbilang baik, namun dapat pula dikatakan buruk, sebab kesempatan dalam pemberdayaan dilakukan secara sukarela dan tidak meluas Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Terkait kesempatan ya, Kami sudah memberikan kesempatan kepada Masyarakat dalam pemberdayaan seperti pembuatan jalan dengan memilih Masyarakat Desa sini daripada kontraktor luar.” “Mereka melakukan pemberdayaan secara sukarela dan tidak meluas, contoh pembuatan jalan waktu itu, Mereka hanya memberikan pemberdayaan terkait hal itu saja dan bagi yang mau.”

Tanggung Jawab Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang Guna Mensukseskan Pembangunan Desa

Tanggung jawab merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap yang diberikan dengan maksimal. Tanggung jawab dalam pemberdayaan sangatlah penting dimiliki oleh Pemerintah, sebab Pemerintah harus bertanggung jawab dalam pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah Desa Warung Bambu sudah bertanggung jawab dalam pemberdayaan terkait Pembangunan Desa namun pemberdayaan yang diberikan belum memberikan sebuah inovasi ke arah yang lebih sehingga tidak adanya pembaharuan yang dilakukan Pemerintah dalam Pemberdayaan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Kami tentu sudah bertanggung jawab dalam pemberdayaan yang kami jalankan, Namun ya kami masih menerapkan cara lama untuk melakukan suatu pemberdayaan.” Masyarakat Desa Warung Bambu sangat kurang puas dalam tanggung jawab pembaharuan yang dilakukan Pemerintah Desa. Pembaharuan yang terjadi dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang baik, namun seperti melakukan jalan di tempat saja. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Saya sebagai Masyarakat kurang puas atas tanggung jawab mereka dalam pembaharuan terkait pemberdayaan. Mereka masih jalan di tempat.”

Dukungan yang diberikan Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang Guna Mensukseskan Pembangunan Desa

Dukungan merupakan sebuah aspek yang berfungsi untuk meningkatkan semangat. Dukungan dalam pemberdayaan sangatlah berpengaruh dalam jalannya pemberdayaan. Tanpa

dukungan dari Masyarakat, tentunya tidak akan berjalan pemberdayaan yang dilakukan. Pada Desa Warung Bambu, Pemerintah mendapat dukungan yang cukup baik dalam pemberdayaan terkait pembangunan Desa. Namun, Pemerintah harus meningkatkan kembali pemberdayaan yang selama ini terhambat akibat pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan dari Masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Mustakim selaku Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Dalam hal Dungan, ya Kami tentu mendapat dukungan dari Masyarakat cukup baik, namun Kami harus meningkatkan lagi pemberdayaan yang terhambat akibat pandemic Covid-19 dengan bantuan dukungan Masyarakat.” Masyarakat Desa Warung Bambu mendukung pemberdayaan yang dilakukan, namun Masyarakat menunggu sebuah pemberdayaan yang baik dan meluas kepada Masyarakat. Supaya menghasilkan keuntungan yang telah di impikan bersama akan nyata hasilnya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Ibu Nani selaku Masyarakat Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang sebagai berikut: “Kami mendukung namun kami menunggu adanya pemberdayaan yang baik dan meluas.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Pemerintah Desa Wanasari dalam mengurangi patologi perekrutan pegawai pada birokrasi Pemerintah, dapat ditarik kesimpulan yaitu: Perencanaan manajemen Pemerintah Desa Wanasari Kabupaten Karawang dalam perekrutan pegawai pada birokrasi pemerintah, sangat terlihat jelas bahwa patologi perekrutan pegawai yaitu kurangnya tenaga ahli akibat banyak pegawai yang tergolong ahli di Desa yang tergiur gaji besar di Perusahaan sehingga Pemerintah Desa kekurangan tenaga ahli. Dalam perencanaan perekrutan pegawai melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan RT/RW. Kepuasan Masyarakat cukup puas, sebab perekrutan terbuka untuk umum dan meluas. Perencanaan dipimpin oleh Kepala Desa. Pengorganisasian manajemen Pemerintahan Desa Wanasari Kabupaten Karawang dalam perekrutan pegawai pada birokrasi Pemerintah, Pengorganisasian diawali dari RT/RW mengajukan kandidat, kemudian dimusyawarahkan dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setempat. Kemudian diajukan ke Kepala Desa bagi yang lolos seleksi untuk di interview mengenai kesiapannya. Dalam perekrutan pegawai tidak melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga lainnya yang tidak memiliki urusan. Pemerintah Desa Wanasari selalu melakukan evaluasi setelah melakukan perekrutan pegawai. Penyeleksian sudah bagus, namun dalam penyeleksian, Pemerintah harus memiliki ketegasan terkadang kurang konsekuen dalam hal penyeleksian. Pelaksanaan manajemen Pemerintah Desa Wanasari Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa Wanasari sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Namun dalam hal penentuan periode jabatan masih ada kekurangan yaitu tidak ada batasan, kecuali pegawai atau perangkat Desa tersebut meninggal dunia. Sumber Daya Manusia di Desa Wanasari dalam hal pelaksanaan kerja di Pemerintah Desa, masih kurang dan tidak ahli serta tidak memenuhi kriteria. Namun karena kekurangan tenaga kerja jadi siapa saja bisa menjadi Pegawai Pemerintah. Pengawasan manajemen Pemerintah Desa Wanasari Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa Wanasari dalam perekrutan pegawai tidak melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas), karena tidak ada di Desa Wanasari. Namun, tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat dilibatkan. Jika kurang dari target dalam perekrutan pegawai, Pemerintah Desa Wanasari mengadakan musyawarah dengan Lembaga Desa seperti LPM, BPD untuk mengevaluasi perekrutan agar menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Desa Wanasari dalam Perencanaan perekrutan pegawai harus membuat sebuah kebijakan baru yang mengundang minat tenaga ahli, supaya banyak yang menginginkan bekerja di Pemerintahan Desa Wanasari daripada Perusahaan. Padahal

Pemerintah Desa merupakan sebuah kunci maju atau tidaknya sebuah Desa dalam segi pelayanan publik dan pembangunan. Pemerintah Desa Wanasari harus melibatkan lebih banyak perwakilan dari masyarakat dalam musyawarah pencarian calon pegawai atau perangkat Desa. Ini berarti tidak hanya RT/RW, LPM, dan BPD yang harus hadir. Hal ini akan meningkatkan transparansi lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki ketegasan yang terkadang kurang konsekuen dalam memilih pegawai. Dengan menetapkan periode masa jabatan pegawai, pemerintah Desa Wanasari akan mengkaderisasi pegawai dengan baik, dan pegawai atau perangkat desa dapat berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Dan masalah kekurangan pegawai dalam perekrutan dapat diatasi dengan baik. Selain itu, masalah lain yang belum diselesaikan dapat dicari dan diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Dwi Iriani Margayaningsih. (2015). Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah. *Publiciana*, 8(1).
- Faisal, M. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1).
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).
- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoretis). *INOVASI*, 7(4).
- Hikmat Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Karmila, Said, A., & Fatmawati, F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(2).
- Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *DEMOKRASI*, X(1).
- Mardikanto. (2010). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit TS.
- Mendrofa, D., & Rosidi. (2018). Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemerintahan: Majalah Ilmiah Pusat Studi Pengembangan Pemerintahan dan Politik*, 13(1).
- Proborini Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- S.Pakaya, J. (2016). Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13(1).
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- Shuida, I. N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2).

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto Usman. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Timur, F., & Triputro, R. W. (2022). Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JKP)*, 3(3).